

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Sumber Lain

- Anggita, S. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Kredit Pemerintah Di Kantor Pertanahan Kota Bogor*.
- BPKAD Kabupaten Banjar. (2018). *Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*. Bkpad.Banjarkab.Go.Id.
- Danial, E. (2015). Metode Dokumentasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 127.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Hanafi, S. R., & Haryanto, H. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Satker di Wilayah Pembayaran Kppn Klaten yang Membawahi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 45–59.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). *Pengelolaan Keuangan yang Baik Wujud Pemerintahan yang Baik*. [www.Balitbangham.Go.Id](http://www.Balitbangham.Go.Id).
- Kementerian Keuangan. (2019). *Pengenaan biaya surcharge atas transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)*. [Kemenkeupedia.Kemenkeu.Go.Id](http://Kemenkeupedia.Kemenkeu.Go.Id).
- KPPN Klaten. (n.d.). *Profil KPPN Klaten*. [DJPb.Kemenkeu.Go.Id](http://DJPb.Kemenkeu.Go.Id).
- KPPN Klaten. (2022). *Laporan Kinerja KPPN Klaten Tahun 2021*.
- Maulid, L. C., & Sudibyoy, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. *AKUNTABEL*, 17(2), 301–313.
- Novitasari, T. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada

Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).

Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.22373/je.v5i2.5019>

Ramdhani, D., & Herdi. (2021). Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Jurnal Edukasi, Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 42–52.

Sriyani. (2020). *Penatausahaan BendaharA* (I. Subroto (ed.)). PKN STAN.

Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 187–198.

Universitas Komputer Indonesia. (n.d.). *No Title*. [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-boykefitri-34970-8-unikom\\_b-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-boykefitri-34970-8-unikom_b-i.pdf)

Widayati, W. (2014). *Pengelolaan Keuangan Negara*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4428-M1.pdf>

Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(1983), 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013*

*tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*